

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alatas, Syed Husein, 1983, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Amsari, Feri, *Et. Al.*, 2020, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia Demokratisasi Internal Partai Politik*, Intrans Publishing, Malang.
- Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Umpan Press, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarius Liability)*, RajaGrafindo Persada.
- Junaidi, Veri, *Et. A.l.*, 2011, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Klitgaard, Robert, 1998, *Membasmi Korupsi*, Diterjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Jakarta.
- Koirudun, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Kommers, Donalt P, 1989, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, Duke University, Durham-London.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia; Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, Muchtar dan James C. Scoot, 1977, *Etika Pegawai Negeri*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.
- Maclver, Robert Morrison, 1955, *The Modern State (First Edition)*, Oxford University Press, London.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta
- MD, Moh. Mahfud, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Neumann, Sigmund, 1963, *Modern Political Parties*, The Free Press of Glencoe, London.
- Putra, Erlanda Juliansyah, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sartori, Giovanni, 2005, *Parties and Party System, a Framework for Analipsis*, ECPR Press, Colchester.
- Sjahdeini, Sultan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Symonides, Janusz, 2000, *Human Righht: Concept and Standart*, UNESCO Publishing, Alderhot-Burlington USA-Singapore-Sydney.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yunara, Edi, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor 140 Tahun 1999, TLN Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (LN Nomor 137 Tahun 2002, TLN Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (LN Nomor 138 Tahun 2002, TLN Nomor 4251).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN Nomor 98 Tahun 2003, TLN Nomor 4316).

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN Nomor 2 Tahun 2008, TLN Nomor 4801).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor 155 Tahun 2009, TLN Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN Nomor 122 TLN Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN Nomor 8 Tahun 2011, TLN Nomor 5189).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN Nomor 70 Tahun 2011, TLN Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor 197 Tahun 2019, TLN Nomor 6409).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN Nomor 216 Tahun 2020, TLN Nomor 6554).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/ PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011.

D. Disertasi

Safa'at, Muchamad Ali, 2009, "Pembubaran Partai Politik di Indonesia", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.

E. Jurnal

Issacharoff, Sam, 2006, *Fragile Democracies*, New York University Public and Legal Theory Working Paper 40.

Oktaryal, Agil dan Proborini Hastuti, 2021, *Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia*, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi , 7 (7), 1-22

Smith, Theodore M., 1971, "Corruption Tradition and Charge." *Indonesia*, Cornell University, No. 11.

Stokes, S.C, 1999, "Political Parties and Democracy." *Annual Review Political Science* 18, No. 2.

F. Internet

Aprianto, "22 Gubernur dan 133 Bupati/Wali Kota Korupsi, Indonesia Dijajah Koruptor", <https://rm.id>.

Rastika, Icha, Nazarddin: Anas dan Andi Otak Korupsi Hambalang,
<https://kompas.com/>

Moerti, Wisnoe, Membubarkan Partai Politik Penerima Uang Korupsi,
<https://merdeka.com/>

